



Media: Kompas

Hari: Senin

Tanggal: 10 Februari 2025

Halaman: 1

Pelantikan 505 Kepala Daerah Diikuti Retret

Sebanyak 505 kepala daerah terpilih akan dilantik di Jakarta pada 20 Februari 2025. Setelah itu, mereka akan mengikuti retret di Akmil, Magelang.

JAKARTA, KOMPAS — Pada 20 Februari 2025, sebanyak 505 kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah 2024 akan dilantik secara serentak oleh Presiden Prabowo Subianto di Jakarta. Selanjutnya, pada 21-28 Februari, para kepala daerah itu akan mengikuti pembekalan atau retret di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, saat meninjau Istana Kepresidenan Yogyakarta di Kota Yogyakarta, Minggu (9/2/2025), mengatakan, Istana Kepresidenan akan menjadi titik kumpul para kepala daerah sebelum mengikuti pembekalan di Akademi Militer (Akmil), Magelang.

"Jadi, insya Allah, direncanakan pelantikan kepala daerah itu tanggal 20 (Februari) di Jakarta. Ada 505 kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota yang akan dilantik langsung Bapak Presiden. Dijadwalkan tanggal 21 (Februari) para kepala daerah itu akan mengikuti pembekalan di Magelang," kata Bima.

Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, gubernur dan wakil gubernur dilantik oleh presiden.

Adapun bupati dan wali kota, seperti diatur dalam Pasal 164 UU Pilkada, dilantik gubernur. Akan tetapi, pada Pasal 164 B UU Pilkada, disebutkan pula bahwa presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dapat melantik bupati dan wakil bupati serta

>> BACA JUGA:

Retret Kepala Daerah Jadi Momen Serap Aspirasi

Tidak hanya untuk menguatkan koordinasi, retret kepala daerah juga menjadi momen untuk menyerap aspirasi. **KOMPAS.ID**

komp.as/serapaspirasi

wali kota dan wakil wali kota secara serentak.

Bima menuturkan, 505 kepala daerah terpilih yang dilantik serentak oleh Presiden tersebut adalah yang sudah tidak beperkara di Mahkamah

(Bersambung ke him 15 kol 1-4)

Pelantikan 505 Kepala Daerah Diikuti Retret

(Sambungan dari halaman 1)

Konstitusi (MK). Mereka terdiri dari kepala daerah yang sejak awal hasil pilkada tidak digugat di MK serta kepala daerah yang sempat bersengketa di MK dan perkaranya tidak berlanjut.

Pada mulanya pemerintah berencana menggelar pelantikan kepala daerah secara serentak pada 6 Februari lalu untuk melantik 296 kepala daerah yang hasil pilkada tidak digugat di MK.

Namun, pemerintah lalu memundurkan jadwal pelantikan menjadi 20 Februari untuk menunggu sidang putusan *dismissal* (perkara) dilanjutkan atau tidak ke tahap pembuktian) di MK terhadap permohonan sengketa hasil pilkada pada 4-5 Februari. Hingga akhirnya, kini terdapat 505 kepala daerah terpilih yang siap dilantik.

Anggota Komisi Pemilihan Umum, Iffa Rosita, mengungkapkan, sebanyak 505 kepala daerah terpilih yang bakal dilantik itu terdiri atas 34 gubernur dan wakil gubernur terpilih, serta 471 bupati-wakil bupati/wali kota-wakil wali kota. "Mereka semua dapat dilantik serentak," ujarnya.

Adapun hingga kini masih ada 40 perkara sengketa hasil pilkada di MK.

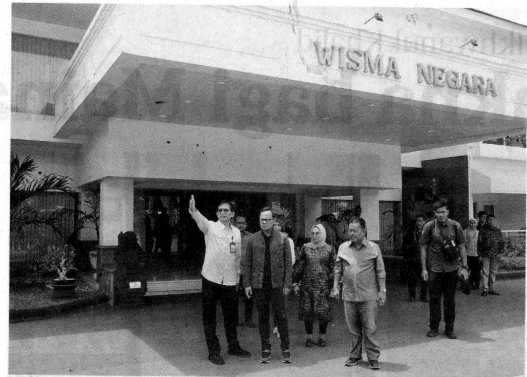
Pembekalan

Menurut Bima, Kementerian Dalam Negeri dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) bertanggung jawab menyusun rangkaian acara pembekalan kepala daerah di Akmil.

Istana Kepresidenan Yogyakarta, lanjut Bima, menjadi salah satu opsi titik kumpul para kepala daerah sebelum bersama-sama berangkat dengan bus menuju Akmil. Dia juga menyebut, berdasarkan komunikasi dengan pengelola Istana Kepresidenan Yogyakarta, tempat itu siap digunakan untuk titik kumpul para kepala daerah.

"Ini adalah salah satu opsi di mana para kepala daerah mungkin akan berkumpul dulu di sini sebelum sama-sama berangkat ke Magelang," ujarnya.

Meskipun demikian, Bima



Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto (kedua dari kiri) meninjau Istana Kepresidenan Yogyakarta di Kota Yogyakarta, Minggu (9/2/2025), sebagai persiapan pelaksanaan pembekalan kepala daerah. Istana Kepresidenan Yogyakarta atau biasa disebut Gedung Agung menjadi salah satu opsi untuk titik kumpul para kepala daerah sebelum mengikuti pembekalan di Akademi Militer pada 21-28 Februari 2025.

mengatakan, masih terbuka opsi lain, yakni para kepala daerah langsung berkumpul di Akmil. Opsi-opsi tersebut bakal dibahas dalam rapat dengan Menteri Sekretaris Negara.

Bima menuturkan, kompleks Akmil sudah disiapkan Presiden Prabowo sebagai tempat untuk pembekalan para pemimpin. Sebelumnya, para menteri, wakil menteri, dan pejabat terkait juga mengikuti pembekalan di Akmil.

"Di sana sudah ada tempatnya, daripada kita mengeluarkan anggaran lagi untuk tempat lain, lebih efektif dan efisien di situ saja. Tenda-tenda bisa menggunakan tenda-tenda yang sudah disiapkan dan pernah digunakan oleh para menteri," ucap Bima.

Dalam pembekalan itu, kata Bima, ada beberapa materi yang bakal disampaikan. Salah satunya terkait tugas, pokok, dan fungsi para kepala daerah. Selain itu, juga akan ada materi tentang Astacita atau delapan misi pemerintahan Prabowo-Gibran yang bakal disampaikan para menteri. Di sisi

lain, akan ada pembekalan yang disampaikan Lemhannas.

Diharapkan ada solusi

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Herman N Suparman berharap agar dalam retret di Akmil itu bisa diadipakai solusi untuk memperbaiki komunikasi antara pusat dan daerah. "Karena itu, jangan sampai kegiatan ini hanya ada komunikasi satu arah, tetapi dua arah saat pemerintah pusat mendengar aspirasi dari kepala daerah," tutur Herman.

Herman menilai, selama ini ada tiga garis besar dalam sinkronisasi pusat dan daerah, yakni terkait hubungan kewenangan, keuangan, serta pembinaan-pengawasan. Kewenangan antara pusat dan daerah, lanjutnya, sering kali tidak sejalan sehingga performa pemerintah daerah menjadi tidak maksimal. Sementara itu, hubungan keuangan dalam konteks transfer ke daerah masih kental dengan sentralisasi di tengah semangat oto-

nomi daerah.

"Ini lebih banyak terkait dengan fiskal. Kami melihat, hubungan keuangan pusat dan daerah ini aroma *mandatory spending* (belanja yang diatur undang-undang) terkait belanja pegawai, belanja infrastruktur, dan beberapa peraturan sektoral lainnya," kata Herman.

Adapun terkait pembinaan dan pengawasan, Herman melihat pemerintah pusat menerapkan pola yang sama ke seluruh daerah. Padahal, setiap daerah memiliki permasalahan hingga kapasitas sumber daya manusia yang berbeda.

"Binas (pembinaan dan pengawasan) yang diharapkan itu asimetris. Jangan sampai pembinaan daerah di Pulau Jawa disamakan di daerah Timur Indonesia. Itu tidak akan berjalan optimal. Saya harap, dalam retret kepala daerah nanti, isu itu bisa dibahas dengan mendengarkan aspirasi para kepala daerah yang terpilih," kata Herman.

(HRS/RTG/BOW)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005